

SKRIPSI

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN
KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

DESY SEPTIANI



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**DESY SEPTIANI
A31116310**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

disusun dan diajukan oleh

DESY SEPTIANI
A31116310

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 17 Januari 2021

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650731 199103 2 002

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA., CRA., CRP
NIP 19640609 199203 1 003



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 196604051992032003

SKRIPSI

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING

disusun dan diajukan oleh

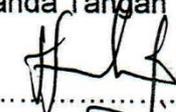
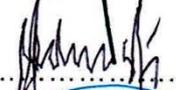
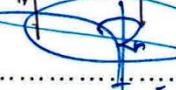
DESY SEPTIANI

A31116310

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 18 Maret 2021 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

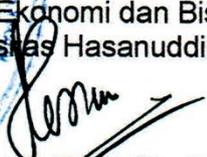
Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1..... 
2	Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, CRA, CRP	Sekretaris	2..... 
3	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E, M.Si., Ak., CA	Anggota	3..... 
4	Dr. Grace T. Pontoh, S.E., Ak., M.Si., CA	Anggota	4..... 



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin


Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA, CRA, CRP
NIP 196604051992032003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Desy Septiani

NIM : A31116310

Jurusan/Program Studi : Akuntansi/Strata Satu

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA
TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA
PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA DENGAN BUDAYA
ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan,

The image shows a yellow 1000 Rupiah postage stamp with a signature written over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL', '20', 'METERAL', 'TEMBELI', and '3CCAJX154029454'. The signature is in black ink and appears to be 'Desy Septiani'.

Desy Septiani

PRAKATA

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT. atas berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga peneliti diberikan kesehatan, kesempatan dan pengetahuan dalam menyelesaikan skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Pertama, ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada ibu Prof. Dr. Hj. Haliah, S.E.,M.Si.,Ak.,CA dan bapak Prof. Dr. H. Arifuddin, S.E., Ak., M.Si., CA, CRA, CRP dosen Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, selaku pembimbing yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada kedua Orang Tua, beserta keluarga dari penulis atas dukungan penuh yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini. Terakhir, ucapan terima kasih kepada Nuzul Ramadhan Rahman yang telah banyak membantu dan mendampingi penulis dalam penulisan skripsi ini. Tak lupa juga penulis sampaikan terimakasih kepada kawan-kawan penulis diantaranya Rio Elton Josua, Tariq Hidayatullah, Muh.Resa Saputra, Fadhil Paluseri, Fitya Nuryasyfi A, Naifah Azisah, Nurhidayani, Virgita Siti Indah P, Nur Athirah Arianti, Dyan Maulidiyah, Amalia Nurrahman serta teman-teman FAM16LIA yang memberikan dukungan, saran, dan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya dalam bidang akuntansi.

Makassar, 17 Februari 2021

Desy Septiani

ABSTRAK

PENGARUH PENERAPAN SISTEM INFORMASI AKUNTANSI, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA DENGAN BUDAYA ORGANISASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI.

Desy Septiani
Haliah Imran
Arifuddin

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner dengan total sampel sebanyak 110 responden. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan pendekatan *partial Least Square* yang diolah menggunakan SmartPLS 3.0. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sedangkan budaya organisasi tidak dapat memoderasi secara signifikan hubungan antara penerapan sistem informasi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini berarti semakin baik penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berdampak baik terhadap nilai kualitas laporan keuangan.

Kata kunci: sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, kualitas laporan keuangan, budaya organisasi.

ABSTRACT

THE INFLUENCE OF THE IMPLEMENTATION OF ACCOUNTING INFORMATION SYSTEMS, INTERNAL CONTROL SYSTEMS, AND HUMAN RESOURCE COMPETENCE ON THE QUALITY OF FINANCIAL STATEMENTS OF REGIONAL WORKS UNITS OF BULUKUMBA REGENCY WITH ORGANIZATIONAL CULTURE AS MODERATION VARIABLES.

Desy Septiani
Haliah Imran
Arifuddin

This study aims to determine the effect of the implementation of accounting information systems, internal control systems, and human resource competencies on the quality of financial statement with organizational culture as a moderation variable. The data used in this study are primary in the form of a questionnaire with a total sample of 110 respondents. The method used is a quantitative approach and partial least square approach. The results showed that the implementation of accounting information systems, internal control systems, and human resource competence has a significant effect on the quality of financial statements, while organizational culture could not significantly moderate the relation between the implementation of information accounting systems, internal control systems, and human resource competence on the quality of financial statements. This means, the better of implementation of accounting information systems, internal control systems, and human resource competencies in a government agency will have a good impact on the quality of financial statement result.

Keywords: Accounting information systems, Internal control systems, Human resource competency, Quality of financial statements, Organizational culture.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah	9
1.3. Tujuan Penelitian	10
1.4. Kegunaan Penelitian.....	11
1.4.1 Kegunaan Teoritis	11
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	11
1.5. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1. Landasan Teori.....	13
2.1.1. Teori Agensi.....	13
2.1.2. Sistem Informasi Akuntansi.....	14
2.1.3. Sistem Pengendalian Internal	19
2.1.4. Kompetensi Sumber Daya Manusia	23
2.1.5. Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	24
2.1.6. Budaya Organisasi.....	29
2.2. Penelitian Terdahulu	31
2.3. Kerangka Konseptual.....	33
2.4. Hipotesis Penelitian	34
2.4.1. Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi terhadap Kualitas Laporan Keuangan	34
2.4.2. Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	35
2.4.3. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan	37
2.4.4. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Hubungan antara Penerapan Sistem Informasi Akuntansi, Sistem Pengendalian Internal, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan	38

BAB V PENUTUP	72
5.1 Kesimpulan	72
5.2 Saran	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
4.1	Data Distribusi Sampel Penelitian	51
4.2	Rincian Penyebaran Kuesioner	52
4.3	Data Karakteristik Responden	53
4.4	Outer Model (<i>Outer Loading</i>)	56
4.5	Outer Loading Akhir	58
4.6	Pengukuran dengan Kriteria AVE.....	59
4.7	Pengukuran Kriteria AVE (Akhir)	59
4.8	Pengukuran dengan <i>Composite Reliability</i>	60
4.9	Output Bootstrapping-PLS	63

DAFTAR GAMBAR

Gambar		Halaman
1.1	Tren Hasil Pemeriksaan BPK.....	3
2.1	Kerangka Pemikiran.....	33
4.1	Merancang Model Struktural Variabel Konstruk	54
4.2	Outer Model	55

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Biodata.....	78
2. Peta Teori	80
3. Kuesioner	91
4. Hasil Olah Data.....	95

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah menjelaskan bahwa laporan keuangan adalah sebuah laporan terstruktur yang berisi informasi terkait posisi keuangan dan keseluruhan transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Laporan keuangan ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Negara atau daerah dalam satu periode tertentu. Laporan keuangan bertujuan untuk menyajikan informasi terkait,realisasi anggaran,saldo anggaran lebih, posisi keuangan,hasil operasi, arus kas, hasil, dan perubahan ekitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terdiri atas 7 (tujuh) komponen, yaitu: neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan saldo anggaran lebih dan catatan atas laporan keuangan (CaLK). Laporan keuangan pemerintah ini memiliki fungsi yang penting, diantaranya laporan keuangan memberikan gambaran kondisi suatu pemerintah dan sebagai salah satu cara bagi pemerintah daerah mewujudkan akuntabilitas keuangannya. Selain itu laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik (Reszy Pintari: 2019)

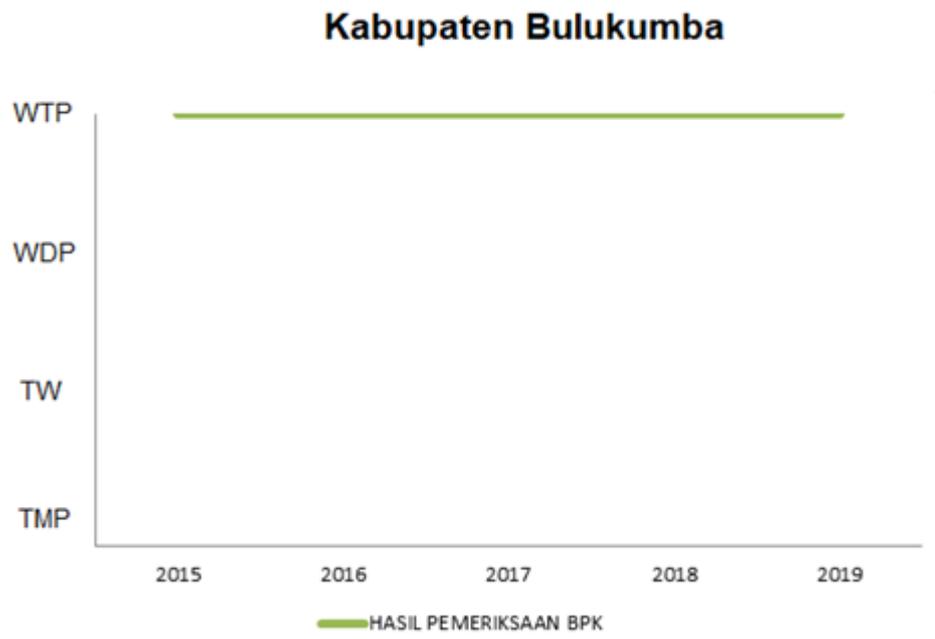
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, laporan keuangan harus menyajikan informasi yang dapat dipahami,

memiliki relevansi, dapat diandalkan, dapat dibandingkan, dan dapat dinilai. Tujuan utama dari pelaporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan suatu instansi atau organisasi. Para pemakai laporan keuangan akan menggunakan informasi tersebut sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan.

Kualitas informasi dalam laporan keuangan ditentukan dari seberapa baik kualitas laporan keuangan tersebut. Para pemakai laporan keuangan menggunakan informasi tersebut sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan karena informasi tersebut dipersiapkan dengan baik, telah disetujui dan diaudit secara transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kualitas laporan keuangan menunjukkan konsep kualitas informasi dari laporan tersebut.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk setiap periode akan memperoleh hasil evaluasi berupa opini dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK). Terdapat empat opini yang diberikan pemeriksa diantaranya opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), opini Tidak Wajar (TW), dan Pernyataan Menolak Memberi Opini atau Tidak Memberi Pendapat (TMP). Setiap opini yang diberikan berdasarkan atas kriteria penilaian diantaranya sistem pengendalian internal yang memadai, kesalahan salah saji material di tiap pos-pos laporan keuangan, serta kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku (SAP).

Berikut ini tren hasil pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Tren Hasil Pemeriksaan BPK

(Sumber : BPK-RI melalui publikasi www.bpk.go.id)

Berdasarkan tren di atas dapat dilihat bahwa opini yang diberikan oleh BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulukumba periode tahun 2015 s/d 2019 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa laporan keuangan tersebut telah sesuai dengan standar yang berlaku dan tidak terjadi kesalahan salah saji dalam laporan keuangan serta Sistem pengendalian yang telah memadai. Tidak mudah bagi pemerintah daerah untuk memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian dari tim audit BPK baik secara perlahan maupun drastis.

Kabupaten Bulukumba telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan berbasis elektronik yang disebut *e-budgeting*. Sistem ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, kualitas, pengawasan kinerja pemerintahan, serta mampu membentuk transparansi pengelolaan keuangan yang dapat mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel. Penerapan *e-budgeting*

merupakan bentuk penerapan sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi. Adapun penerapan sistem pengendalian internal pemerintah Kabupaten Bulukumba yang diterapkan masih berada di level 3 yaitu level terdefinisi (maturasi) hal ini ditandai dengan penerapan praktik pengendalian intern dan telah terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern ini dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Adapun beberapa kelemahan dalam pengendalian internal terjadi dengan dampak yang cukup baik terhadap pencapaian tujuan organisasi.

Sumber daya manusia sebagai pelaksana fungsi organisasi menjadi salah satu elemen penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Secara umum Kabupaten Bulukumba melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) melakukan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di bidang atau ruang lingkup tugas dan fungsinya. Adapun model program pelatihan diawali dengan analisis kebutuhan diklat dan bimbingan teknis sebagai peningkatan spesifikasi keterampilan pegawai. Hal ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Bulukumba. Oleh karena itu penelitian ini menganalisis seberapa besar pengaruh penerapan Sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap keberhasilan penyusunan laporan keuangan tersebut dengan menjadikan budaya organisasi sebagai variable moderasi.

Secara konseptual ada berbagai faktor penentu kualitas pelaporan keuangan. Menurut Rezaee (2003) dalam (Nurrendah:2015) terdapat 6 faktor yang menentukan kualitas pelaporan keuangan yaitu : *board of directors, internal auditor, audit committee, external auditor, top management team, governing bodies*. Adapun beberapa penelitian juga menunjukkan faktor-faktor yang

mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah diantaranya penerapan sistem informasi akuntansi, standar akuntansi pemerintah daerah, pemahaman akuntansi berbasis akrual, sistem pengendalian internal, kualitas sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi dan kompetensi sumber daya manusia pengelola laporan keuangan. Sebuah laporan keuangan dihasilkan dari suatu input yang baik kemudian di proses dengan baik untuk mencapai output yang baik pula. Ketiga aspek ini berkesinambungan sebagai pondasi Sistem pelaporan keuangan yang baik (Kurniawan:2011 dalam Pintari R:2019).

Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan sumber daya, yang terdiri dari manusia dan peralatan yang dirancang untuk mengubah data ke dalam bentuk informasi, selanjutnya informasi tersebut dikomunikasikan kepada para pembuat keputusan. Sistem informasi akuntansi sebagai sub sistem dalam suatu organisasi memiliki tanggung jawab atas penyiapan informasi keuangan dalam pengambilan keputusan manajemen. Sistem ini dirancang untuk menghasilkan informasi berupa informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal organisasi (Agustin:2019).

Laporan keuangan disusun sebagai penyedia informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan operasional yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama suatu periode pelaporan. Akuntansi pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan informasi yang menghasilkan output berupa informasi akuntansi atau laporan keuangan, sehingga penting untuk memahami sistem akuntansi. Penerapan sistem informasi akuntansi ditempatkan dalam upaya mencapai komputerisasi dalam organisasi pemerintah agar lebih akurat, tepat dan komprehensif, sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan yang berkualitas oleh pemakai laporan keuangan tersebut (Pintari:2019).

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan serangkaian upaya untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya organisasi dan berperan dalam pencegahan dan pendeteksian bentuk kecurangan (*fraud*). Sistem pengendalian internal merupakan suatu proses integral pada setiap kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh *stakeholder* baik pimpinan maupun pegawai dalam memberikan gambaran atas pencapaian tujuan melalui efektivitas dan efisiensi kegiatan serta keandalan pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku (Pintari:2019).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP) yang merupakan Sistem Pengendalian Internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang diterima pemerintah dari hasil pemeriksaan yang dilakukan BPK dipengaruhi oleh sistem pengendalian pemerintah. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pengujian terhadap sistem pengendalian internal untuk menentukan ruang lingkup pengujian yang akan dilakukan. Sesuai dengan UU No. 15 Tahun 2004, penjelasan Pasal 16 ayat (1) opini merupakan pernyataan professional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria, salah satunya terkait dengan efektivitas SPI. Hubungan antara sistem pengendalian internal dengan kualitas laporan keuangan adalah dimana entitas yang memiliki sistem pengendalian internal yang baik akan memiliki tingkat keamanan yang tinggi dari kesalahan salah saji. Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. (Setiawan:2020)

Faktor kompetensi sumber daya manusia sangat penting dalam kepemimpinan pemerintahan daerah. Kompetensi sumber daya manusia sangat diperlukan untuk menghasilkan laporan keuangan yang memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan. Sumber daya manusia menjadi faktor penting laporan keuangan yang berkualitas. Dalam hal ini kompetensi sumber daya manusia memiliki peran penting dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan entitas yang bersangkutan. Salah satu permasalahan mendasar penyebab BPK tidak memberikan opini WTP adalah sumber daya manusia (SDM) yang berada di pemerintahan daerah masih ada yang kurang kompeten dan kurang memahami akuntansi pemerintahan, keuangan daerah, serta organisasional tentang pemerintahan. Menurut Wriston dan Esposito dalam (Nurrendah:2015) bahwa untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan dan hasil audit untuk kepentingan manajemen dan prinsipal harus mendapat bantuan penuh dari manajemen organisasi, dewan komisaris, serta komite audit.

Budaya organisasi menjadi salah satu faktor yang menunjang dalam pencapaian tujuan organisasi. Budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap penyusunan rencana strategis dan rencana operasional organisasi sehingga secara langsung maupun tidak langsung dapat berpengaruh terhadap kualitas output, dalam hal ini laporan keuangan. budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap perilaku, cara kerja dan motivasi para manajer dan bawahannya untuk mencapai kinerja organisasi. Hal ini membuat budaya organisasi dapat digunakan sebagai variabel pemoderasi.

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pengaruh penerapan Sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Irzal Tawaqal dan suparno (2017). Hasil

penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan Sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Rukmi Juwita (2013) menunjukkan bahwa Sistem Informasi akuntansi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian yang dilakukan oleh Reni Yendrawati (2013) tentang pengaruh sistem pengendalian intern dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderating menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan, Sedangkan kapasitas sumber daya manusia menunjukkan pengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun faktor eksternal sebagai variabel moderasi hanya menunjukkan pengaruh positif terhadap sistem pengendalian internal.

Beberapa penelitian juga menunjukkan perbedaan dengan teori yang digunakan, diantaranya penelitian yang dilakukan Nurendah Ragilita Untary (2015) bahwa Sistem informasi akuntansi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Desiana Anugerah Budiawan (2014) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian internal tidak berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, begitupun dengan penelitian yang dilakukan Yusar Sugara (2015) menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan hal tersebut sehingga penelitian ini difokuskan pada pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, Sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan

dengan budaya organisasi sebagai variabel moderasi di pemerintah Kabupaten Bulukumba.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah penerapan sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba?
2. Apakah sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba?
3. Apakah kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba?
4. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara Penerapan Sistem informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba?
5. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba?
6. Apakah budaya organisasi berpengaruh terhadap hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman sebagai berikut.

1. Untuk menguji pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba.
2. Untuk menguji pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba.
3. Untuk menguji pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba
4. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi dalam memoderasi hubungan antara Penerapan Sistem informasi Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba.
5. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi dalam memoderasi hubungan antara Sistem Pengendalian Internal terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba.
6. Untuk menguji pengaruh budaya organisasi dalam memoderasi hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap kualitas laporan keuangan pada SKPD Kabupaten Bulukumba.

1.4 Kegunaan Penelitian

Pada bagian kegunaan penelitian menunjukkan kegunaan dan pentingnya penelitian, terutama bagi pengembangan ilmu atau pelaksanaan pembangunan dalam arti luas.

1.4.1 Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada pengembangan bidang ilmu akuntansi khususnya sektor publik dalam membahas pengaruh penerapan Sistem informasi, Sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan dengan

budaya organisasi sebagai variable moderasi dan dapat memberikan tambahan wawasan kepada pembaca yang didukung oleh berbagai teori yang melandasi penelitian ini.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak pemerintah daerah untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kebijakan penerapan Sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, kompetensi sumber daya manusia, dan budaya organisasi.

1.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang berurutan, sehingga dapat memberikan gambaran menyeluruh terhadap penelitian ini. Penelitian ini terdiri dari beberapa bab, yaitu sebagai berikut.

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan merupakan bab pertama dalam skripsi yang memberikan jawaban atas pertanyaan terkait apa yang diteliti? Untuk apa dan mengapa penelitian dilakukan. Bab ini terdiri atas latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi deskripsi teoritis tentang variabel yang dilibatkan dalam penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis penelitian.

BAB III : Metode Penelitian

Bab ini memberikan penjelasan terkait rancangan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan

data, variabel penelitian dan definisi operasional variabel serta metode analisis data.

BAB IV : Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi, hasil uji kualitas data, hasil uji asumsi klasik, hasil pengujian hipotesis, serta pembahasan hasil penelitian.

BAB V : Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dalam skripsi yang berisi kesimpulan atas penelitian, keterbatasan penelitian hingga saran untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi

Teori agensi berfokus pada dua individu yaitu principal dan agen. Principal mendelegasikan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada agen. Dalam beberapa penelitian akuntansi manajemen, teori agensi digunakan untuk mengidentifikasi kombinasi kontrak kerja dan sistem informasi yang akan memaksimalkan fungsi manfaat principal, dan kendala-kendala perilaku yang muncul dari kepentingan agen. Dalam teori agensi, informasi akuntansi manajemen digunakan untuk dua tujuan. Pertama, digunakan untuk pengambilan keputusan oleh principal dan agen. Dan kedua, digunakan untuk mengevaluasi dan membagi hasil sesuai dengan kontrak kerja yang telah dibuat dan disteujui. Hal ini disebut dengan *performance evaluation role* yang dapat memotivasi agen untuk berusaha seoptimal mungkin. (Eko Raharjo:2007)

Menurut Jansen & Meckling dalam (Eko Raharjo:2007) teori organisasi dan kebijaksanaan perusahaan sangat dipengaruhi teori agensi yang menggambarkan top manajer sebagai agen dalam suatu perusahaan, dimana manajer dan pemilik memiliki kepentingan yang berbeda, tetapi sama-sama berusaha memaksimalkan kepuasannya masing-masing. Sebagai agen, manajer secara moral bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik namun disisi lain manajer juga mempunyai tanggungjawab memaksimalkan kesejahteraan mereka. Oleh karena itu, kemungkinan besar agen tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal*.

Dalam organisasi pemerintahan lembaga eksekutif berperan sebagai *agent* sedangkan lembaga legislatif sebagai wakil rakyat berperan sebagai *principal*. Menurut Halim dalam Wahyu Setiawan (2020), dalam perencanaan penganggaran APBD, eksekutif cenderung merencanakan anggaran pendapatan yang kecil namun anggaran belanja yang besar. Pertanggungjawaban eksekutif kepada legislative dapat dilihat dari laporan keuangan yang disampaikan kepada legislatif setiap akhir tahun anggaran.

Laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran dan telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Audit dilakukan untuk memperkecil terjadinya kesenjangan informasi antara pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah daerah dan pihak legislatif sebagai wakil rakyat. Dalam audit ini, BPK akan mengeluarkan opini terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang menggambarkan akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. (Wahyu Setiawan:2020)

2.1.2 Sistem Informasi Akuntansi

2.1.2.1 Kerangka Konseptual Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Sutarman (2012:13) menjelaskan bahwa sistem informasi akuntansi adalah proses mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu, yang terdiri dari input (data, intruksi) dan output (laporan, kalkulasi). Sistem informasi merupakan himpunan dari beberapa sub Sistem yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk menghasilkan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan.

Romey dan Steibert (2015:36) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan.

Sistem ini terdiri dari orang, prosedur dan instruksi, data, perangkat lunak, infrastruktur teknologi, informasi serta pengendalian internal dan ukuran keamanan. Secara umum Sistem informasi akuntansi merupakan kumpulan dari suatu sumber daya yang terdiri dari manusia dan peralatan, yang di dalamnya terdapat proses pengubahan data sebagai input untuk menghasilkan output berupa informasi untuk dikomunikasikan ke berbagai pihak berkepentingan untuk menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.

Menurut Susanto (2013:8) bahwa tujuan sistem informasi akuntansi dalam suatu institut organisasi adalah sebagai berikut :

1. Mendukung aktivitas perusahaan sehari-hari.
2. Mendukung proses pengambilan keputusan.
3. Membantu dalam manajemen perusahaan untuk memenuhi tanggung jawabnya kepada pihak yang berkepentingan.
4. Mengumpulkan dan menginput keseluruhan data transaksi ke dalam sistem informasi akuntansi.
5. Mengolah data transaksi.
6. Menyimpan data untuk tujuan di masa mendatang.
7. Menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai atau pemberi keputusan (manajemen).
8. Mengontrol semua proses yang terjadi.

2.1.2.2 Komponen Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Marshall dan Paul (2014:11) terdapat enam komponen dari sistem informasi akuntansi, yaitu :

- a. Orang yang menggunakan sistem.

- b. Prosedur dan intruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data.
- c. Data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya.
- d. Perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data.
- e. Infrastruktur teknologi informasi, meliputi komputer, perangkat periferial, dan perangkat jringan yang digunakan dalam SIA.
- f. Pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA.

Adapun menurut Krismiaji dalam (Hanggoro,2019) sistem informasi memiliki 8 komponen yaitu :

- a. Tujuan sebagai pengarah bagi sistem secara keseluruhan.
- b. Input, yang dimaksud dengan input adalah data yang dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sistem.
- c. Output atau informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem. Output sebuah sistem informasi akuntansi adalah laporan keuangan internal seperti daftar umur piutang, anggaran, dan proyeksi arus kas.
- d. Penyimpanan data.
- e. Pemroses data.
- f. Intruksi dan Prosedur.
- g. Pemakai atau orang yang berinteraksi dengan sistem dan menggunakan informasi yang dihasilkan oleh sistem.
- h. Pengamanan dan pengawasan.

2.1.2.3 Pengukuran Kualitas Sistem Informasi Akuntansi

Dalam Della (2019) menurut Reynolds dan Steir (2008) kinerja sistem biasanya ditentukan oleh faktor-faktor seperti berikut:

1. Ketepatan waktu output, Disediakan tepat waktu bagi pengambil keputusan untuk membuat keputusan
2. Kemudahan penggunaan, mengembangkan aplikasi yang dapat dipelajari dan digunakan oleh para manajer dan karyawan sangat penting untuk memastikan bahwa orang-orang akan bekerja dengan aplikasi secara produktif
3. Skalabilitas, Sistem informasi berkualitas dapat menangani pertumbuhan bisnis dan peningkatan volume bisnis tanpa penurunan kinerja yang nyata.
4. Waktu respons Sistem, Waktu respon rata-rata untuk transaksi online suatu sistem sering merupakan faktor kunci dalam menentukan produktivitas pekerja dan layanan pelanggan.
5. Ketersediaan, Ketersediaan mengukur waktu per bulan sistem dijadwalkan akan tersedia untuk digunakan. Sistem biasanya tidak tersedia beberapa waktu untuk memungkinkan peningkatan dan pemeliharaan perangkat lunak
6. Keandalan, Sistem yang berkualitas diharapkan dapat menghasilkan informasi yang andal. Produktivitas pekerja menurun dan ketidakpuasan pelanggan meningkat seiring menurunnya sistem persaingan.

Menurut Romney dan Steinbart (2017:635) kualitas sistem informasi akuntansi dapat diukur dengan karakteristik sebagai berikut:

- 1) Kegunaan (*Usefulness*)
- 2) Ekonomis (*Economy*)
- 3) Keandalan (*Reliability*)
- 4) Ketersediaan
- 5) Pelayanan (*customer service*)
- 6) Kapasitas (*Capacity*)
- 7) Kemudahan Penggunaan (*Ease Of Use*)

- 8) Fleksibel (*Flexibility*) Sistem harus dapat mengakomodasi perubahan persyaratan yang wajar.
- 9) Traktabiliitas (*Tractability*), Sistem mudah dipahami dan memfasilitasi penyelesaian masalah dan pengembangan dimasa depan.
- 10) Auditability, artinya dibangun kedalam sistem dari awal. (*Auditability is built into the Sistem from the beginning*).
- 11) Keamanan (*Security*), Demi keamanan informasi hanya pengguna yang diberi wewenang, yang diberi akses ke atau diizinkan untuk mengubah data Sistem.

Secara umum Sistem informasi akuntansi dapat dikatakan berkualitas apabila Sistem tersebut mudah digunakan, ketersediaan Sistem, bersifat fleksibel serta efisien dan bermanfaat.

2.1.3 Sistem Pengendalian Internal

2.1.3.1 Kerangka Konseptual Sistem Pengendalian Internal Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah ini merupakan pelaksanaan amanat yang tertuang dalam Undang- Undang nomor 1 tahun 2004 yang menjelaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah sebagai suatu proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai dala rangka memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset Negara, dan

ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem pengendalian Internal dilakukan secara menyeluruh dalam lingkungan pemerintahan baik pusat maupun daerah yang meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian, dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Tujuan sistem pengendalian internal pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 adalah :

1. Kegiatan yang efektif dan efisien, artinya kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan rencana dan hasil yang diperoleh telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dan memiliki kualitas yang tinggi dengan memanfaatkan sumber daya yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Laporan keuangan yang dapat diandalkan, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut bersifat andal dan dapat dipercaya sehingga dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
3. Pengamanan asset Negara, hal ini dapat ditunjukkan dengan kegiatan pengendalian seperti pembatasan akses pengguna aset, data dan informasi, penyediaan petugas keamanan, dan sebagainya.
4. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan

2.1.3.2 Unsur-unsur Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP)

Unsur Sistem pengendalian internal berfungsi sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan tolak ukur dalam pengujian efektivitas penyelenggaraan Sistem pengendalian internal.

Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008 unsur pengendalian internal dalam peraturan ini mengacu pada unsur-unsur pengendalian yang dikemukakan oleh *Committee of Sponsoring Organization of the Tread way Comission (COSO)* yang terdiri atas :

1. Lingkungan Pengendalian
2. Penaksiran risiko
3. Informasi dan komunikasi
4. Aktivitas pengendalian
5. Pemantauan

Adapun dalam PP No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah, terdapat lima unsur dari pengendalian internal pemerintahan yaitu :

1. Lingkungan Pengendalian, menggambarkan seluruh tindakan, kebijakan, dan prosedur yang menggambarkan keseluruhan sikap organisasi. Beberapa factor yang membentuk lingkungan pengendalian adalah :
 - a. Nilai Integritas dan etika merupakan produk standar etika, perilaku organisasi dan bagaimana standar tersebut dikomunikasikan dan didorong untuk dilaksanakan. Bagaimana menjaga etika organisasi, serta menghindari tindakan tidak etis dan mendorong terciptanya kedisiplinan dalam organisasi.
 - b. Komitemen terhadap kompetensi mencakup pertimbangan manajemen atas pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dan fungsi pada masing-masing bidang dalam organisasi.
 - c. Kepemimpinan yang kondusif, seorang pemimpin harus selalu mempertimbangkan setiap risiko dalam pengambilan keputusan.

- d. Struktur organisasi, merupakan kerangka kerja bagi manajemen dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengendalian organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
 - e. Pembagian wewenang dan pembebanan tanggung jawab, merupakan suatu bentuk komunikasi formal atas pengendalian masalah atau kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. Penilaian Risiko, merupakan suatu proses mengidentifikasi, menganalisis, dan mengelola risiko yang berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi. Penilaian risiko mencakup :
- a. Identifikasi Risiko, artinya mengidentifikasi secara efektif dan efisien risiko yang dapat menjadi penghambat dalam pencapaian tujuan organisasi baik risiko internal maupun eksternal.
 - b. Analisis Risiko, artinya menentukan dampak yang akan ditimbulkan dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan organisasi.
3. Kegiatan pengendalian, merupakan kumpulan kebijakan dan prosedur yang telah dibuat oleh manajemen dalam rangka menghasilkan laporan keuangan yang objektif. Yang mencakup :
- a. Review atas kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan;
 - b. Pembinaan sumber daya manusia;
 - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi;
 - d. Review atas indikator kinerja;
 - e. Pemisahan fungsi;
 - f. Otorisasi atas transaksi yang penting;
 - g. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu
 - h. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya
 - i. Dokumentasi data sistem pengendalian intern dan keseluruhan transaksi.

4. Komunikasi dan informasi, merupakan komponen Sistem pengendalian internal yang memastikan kelima komponen memiliki hubungan yang integral. Hal-hal yang harus dilakukan sebagai seorang pimpinan instansi pemerintah diantaranya melakukan proses identifikasi, pencatatan dan pengomunikasian informasi secara tepat dan efektif.
5. Pemantauan Pengendalian Internal, merupakan pengawasan yang dilakukan oleh manajemen sebagai penilaian terhadap kualitas dan efektivitas Sistem pengendalian internal. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Sistem pengendalian telah berjalan sebagaimana yang direncanakan dan diperbaiki sesuai kebutuhan.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan suatu proses yang telah dirancang dengan pemanfaatan teknologi sebagai upaya pencapaian tujuan organisasi.

2.1.4 Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (Kelembagaan) atau suatu Sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Emilda 2014:3). Kompetensi merupakan kemampuan untuk mencapai suatu kinerja dalam pencapaian *output* ataupun *outcomes* suatu organisasi.

Kompetensi sumber daya manusia yang merupakan kemampuan dan karakteristik yang dimiliki oleh seorang Pegawai Negeri Sipil berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara profesional, efektif dan efisien.(Keputusan

Badan Kepegawaian Negara RI Nomor 46A Tahun 2003 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Struktural Pegawai Negeri Sipil)

Menurut Tjiptoherijanto (2001) dalam Alimbudiono & Fidelis (2004) dalam As Syifa Nurillah (2014), untuk menilai kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam melaksanakan fungsinya, termasuk akuntansi dapat dilihat dari tingkat pertanggungjawaban dan kompetensi sumber daya tersebut. Suatu tanggung jawab dapat dilihat dari deskripsi jabatan. Deskripsi jabatan merupakan suatu dasar dalam melaksanakan tugas dengan baik. Sedangkan kompetensi dapat dilihat dari latar belakang pendidikan, pelatihan yang pernah diikuti, dan keterampilan yang dinyatakan dalam pelaksanaan tugas.

Sedarmayanti (2016:286), menjelaskan dimensi kompetensi sumber daya manusia yang dilihat dari karakteristik kemampuan, mencakup :

1. Pengetahuan, terdiri dari pengetahuan akuntansi keuangan dan ilmu pengetahuan lain yang terkait, serta pengetahuan mengenai bisnis dan organisasi.
2. Keterampilan, terdiri dari keterampilan teknis dan fungsional, keterampilan intelektual, berorganisasi, personal, komunikasi dan intra personal.
3. Sikap, memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitifitas terhadap tanggung jawab social, pengembangan diri, bertanggung jawab, disiplin, menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

2.1.5 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

2.1.5.1 Pengertian Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, menyatakan bahwa laporan keuangan adalah laporan terstruktur yang berisi informasi mengenai posisi keuangan dan keseluruhan

transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode tertentu. Laporan keuangan menjadi alat yang digunakan untuk menunjukkan capaian kinerja dan pelaksanaan fungsi pertanggungjawaban dalam entitas.

Laporan keuangan daerah merupakan ringkasan dari hasil pencatatan akuntansi berupa informasi keuangan dan aktivitas pemerintah selama satu tahun buku sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyat atas pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi keuangan, hasil usaha, serta kinerja pemerintahan pada periode tertentu.

Kualitas laporan keuangan ditentukan apabila laporan tersebut telah memenuhi standar akuntansi yang berlaku dan informasi yang disajikan dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan tersebut.

Menurut Erlina dkk (2015:25) dalam Della (2019:16) kualitas laporan keuangan pemerintah adalah ukuran orang yang menilai atau merinci pengukuran, pencatatan, dan transaksi ekonomi yang menyatakan aktivitas yang berhubungan dengan uang dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintahan daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukan.

Winwin dan Abdullah (2017:7) dalam Della (2019:16) mengatakan bahwa laporan keuangan yang berkualitas merupakan output informasi keuangan yang berguna bagi pengambilan keputusan, pelaporan keuangan seperti ini dapat dicapai apabila memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan yang berkualitas adalah laporan keuangan yang menyajikan

informasi yang telah memenuhi karakteristik kualitatif informasi keuangan sehingga dapat dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan manajemen.

2.1.5.2 Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Tujuan utama laporan keuangan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, adalah menyajikan informasi terkait Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Ketujuh laporan ini menjadi komponen dalam laporan keuangan pemerintah.

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), berisi kegiatan keuangan pemerintah pusat/ daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan.
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, berisi informasi terkait selisih saldo anggaran lebih tahun berjalan dengan tahun sebelumnya.
3. Neraca, menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas, pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.
4. Laporan Operasional (LO), menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintah dalam suatu periode pelaporan, unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan

operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

5. Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi kas sehubungan dengan menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/ daerah selama periode tertentu. Unsur yang dicakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan SAL, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca dan Laporan Arus Kas.

2.1.5.3 Faktor- faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut beberapa ahli terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan diantaranya :

Menurut Ida Ayu Enny Kiranayanti dan Ni Made Adi Erawati (2016) :

1. Sumber Daya Manusia
2. Sistem Pengendalian Internal
3. Pemahaman Basis Akrua

Menurut Rukmi Juwita (2013) ada dua factor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu :

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah
2. Sistem Informasi Akuntansi

Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa factor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah adalah Kualitas Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Sistem Informasi Akuntansi, dan Standar Akuntansi Pemerintah.

2.1.5.4 Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Menurut Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah indikator-indikator normatif yang harus dicapai dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Terdapat empat karakteristik yang merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan dapat berkualitas :

1. Relevan, laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang disajikan didalamnya dapat berguna bagi pengguna informasi dalam membuat keputusan dan membantu mereka dalam mengevaluasi kinerja organisasi dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi yang relevan yaitu informasi yang memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu dan lengkap.
2. Andal, laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian menyesatkan dan kesehatan material, menyajikan fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi yang andal memiliki ciri-ciri diantaranya penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan bersifat netralitas.
3. Dapat dibandingkan, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan ini dapat dilakukan secara internal maupun eksternal.

4. Dapat dipahami, artinya informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang disesuaikan dengan pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan.

2.1.6 Budaya Organisasi

Menurut Edy Sutrisno (2010) budaya organisasi merupakan perangkat Sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumption*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan social yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja. Budaya organisasi sebagai suatu sistem makna bersama yang dianut oleh seluruh anggota yang menjadi pembeda organisasi satu dengan organisasi lain. Setiap organisasi memiliki budaya yang berbeda, oleh karena itu budaya organisasi yang dibangun semestinya sejalan dengan visi, misi serta strategi dari organisasi tersebut (Robbins:2013).

Menurut koesmono (2005) budaya organisasi merupakan falsafah, ideology, nilai-nilai, anggapan, keyakinan, harapan, sikap dan norma-norma yang dimiliki secara bersama serta mengikat dalam suatu komunitas tertentu. Secara spesifik budaya dalam organisasi dipengaruhi oleh kondisi *team work*, *leaders*, dan *characteristic of organization* serta *administration process* yang berlaku. Budaya organisasi penting karena merupakan kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam hirarki organisasi yang mewakili norma-norma perilaku yang diikuti oleh para anggota organisasi.

Budaya organisasi menjadi pendukung organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja organisasi sebagaimana dinyatakan oleh Deal & Kennedy (1982), Miller (1990), Robbins (1990) dalam Edy Sutrisno (2010) karena menimbulkan:

1. Nilai-nilai kunci yang saling menjalin, tersosialisasikan, menginternalisasi, menjiwai pada para anggota, dan merupakan kekuatan yang tidak tampak.
2. Perilaku-perilaku karyawan secara tak disadari terkendali dan terkoordinasi oleh kekuatan yang informal.
3. Para anggota merasa berkomitmen dan loyal terhadap organisasi.
4. Adanya musyawarah dan kebersamaan atau kesertaan dalam hal-hal yang berarti sebagai bentuk partisipasi, pengakuan, dan penghormatan terhadap karyawan.
5. Semua kegiatan berorientasi atau diarahkan kepada misi atau tujuan organisasi.
6. Adanya koordinasi, integrasi, dan konsistensi yang menstabilkan kegiatan-kegiatan perusahaan atau organisasi.
7. Berpengaruh kuat terhadap organisasi dalam tiga aspek : pengarahannya perilaku dan kinerja organisasi, penyebarannya pada para anggota organisasi, dan kekuatannya menekan para anggota melaksanakan nilai-nilai budaya.
8. Budaya berpengaruh terhadap perilaku individual maupun kelompok.

Pada dasarnya budaya organisasi merupakan alat untuk mempersatukan setiap individu yang melakukan aktivitas secara bersama-sama. Budaya organisasi lahir dari sebuah kesepakatan yang mengarah pada suatu Sistem makna secara bersama, dianut oleh anggota organisasi. Budaya organisasi memiliki keutamaan sebagai pengendali dan arah dalam membentuk sikap dan

perilaku manusia yang melibatkan diri dalam suatu organisasi. Secara individu maupun kelompok seseorang tidak akan terlepas dengan budaya organisasi.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah telah dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan oleh Reno Julia Utama (2017) di Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Indagiri Hulu membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia, teknologi informasi, sistem akuntansi keuangan daerah, dan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan oleh Della Agustin (2019) mengetahui pengaruh kualitas sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Bengkulu. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kualitas sistem informasi akuntansi mempengaruhi secara signifikan kualitas laporan keuangan.

Penelitian Wahyu Setiawan (2020) yang menganalisis penerapan *E-Budgeting* dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan sampel pemerintah daerah di seluruh Indonesia yang telah menerapkan sistem *e-budgeting*. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan *e-budgeting* dan sistem pengendalian internal berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Reni Yendrawati (2013) meneliti pengaruh sistem pengendalian internal, dan kapasitas sumber daya manusia terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan faktor eksternal sebagai variabel moderasi. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan, sedangkan

kapasitas sumber daya manusia berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Adapun faktor eksternal hanya dapat memoderasi pengaruh sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Andhi Hanggoro Putro (2019) di KSPPS Bina Insan Mandiri Karanganyar meneliti pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas pelaporan keuangan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Irzal Tawaqqal dan Suparno (2017) meneliti pengaruh penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan di SKPD Kota Banda Aceh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi akuntansi, sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

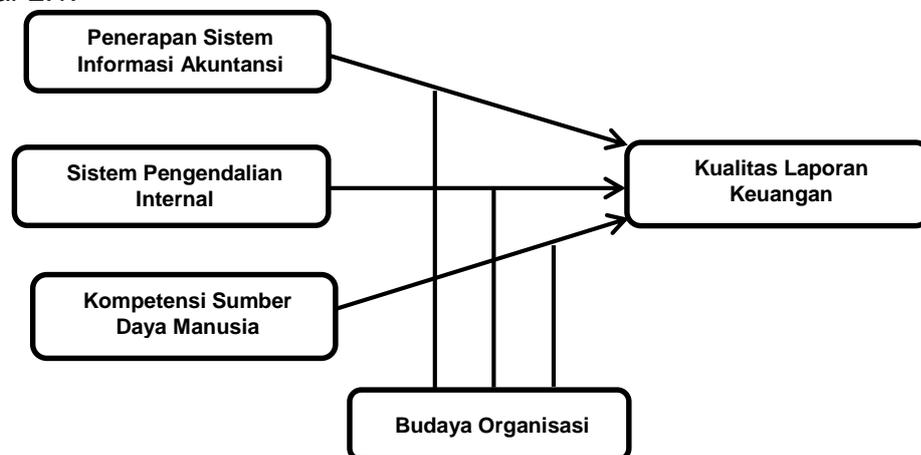
Penelitian yang dilakukan oleh Novitania Mokoginta dkk,(2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh negatif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan sistem informasi akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Liziana Widari dan Sutrisno (2017) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah dan komitmen organisasi berpengaruh secara positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Meidylisa Patty (2019) meneliti pengaruh penerapan *good governance* dan budaya organisasi terhadap kualitas laporan keuangan dengan kepemimpinan transformasional sebagai pemediasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *good governance* dan budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas laporan

keuangan. Adapun *good governance* dan budaya organisasi melalui kepemimpinan transformasional secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

2.3 Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan gambaran sementara terhadap suatu fenomena yang menjadi objek penelitian kita. Kerangk pemikiran disusun berdasarkan analisis pada landasan teori dan penelitian sebelumnya. Kerangka konseptual menjadi argumentas dasar dalam merumuskan hipotesis. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini untuk mengukur seberapa besar pengaruh Penerapan Sistem informasi, Sistem pengendalian internal, dan kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Bulukumba dengan budaya organisasi sebagai *variable moderating* yang digambarkan melalui kerangka konseptual pada gambar 2.1.



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Rumusan hipotesis

2.4.1 Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah penerapan sistem informasi akuntansi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah, dan menyalurkan informasi keuangan daerah pada pelayanan publik. Sistem informasi akuntansi berperan dalam mempermudah pemerintah dalam melaksanakan aktivitas operasional dan digunakan dalam pengambilan keputusan. Sistem informasi akuntansi yang berkualitas adalah Sistem informasi yang bersifat andal, sehingga dapat menjaga kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan dan menjamin tingkat kepercayaan suatu informasi akuntansi. Sistem informasi yang berkualitas juga dapat memberikan proteksi atau perindungan terhadap informasi-informasi tersebut.

Romey dan Steibert (2015:36) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Sedangkan menurut Marshall dan Paul (2014:10) sistem informasi akuntansi adalah suatu sistem yang mengumpulkan mencatat dan menyimpan dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan. Oleh karena itu pemerintah perlu melakukan optimalisasi pemanfaatan kemajuan teknologi untuk membangun jaringan sistem informasi manajemen dan proses kerja yang memungkinkan pemerintah dapat bekerja secara terpadu dengan penyederhanaan akses antar unit kerja dan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Della Agustin (2019) menunjukkan pengaruh positif kualitas Sistem informasi terhadap kualitas laporan keuangan di Organisasi Perangkat Daerah Kota Cianjur. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Rukmi Juwita (2013) menunjukkan bahwa implementasi Sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Adapun penerapan standar akuntansi pemerintahan dan penerapan Sistem informasi akuntansi juga berpengaruh secara simultan terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian pula dengan penelitian yang dilakukan Nurendah Raggilita (2015) dan penelitian yang dilakukan Irzal Tawaqqal dan Suparno menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kembali hubungan antara sistem informasi akuntansi dan kualitas laporan keuangan.

H1 : Sistem Informasi Akuntansi Berpengaruh Positif Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2.4.2 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Pengendalian Intern adalah sebuah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah). Penelitian yang dilakukan Ni Made Trisna Sapitri, I Gst Ayu Purnamawati, Edy Sujana (2015) menunjukkan bahwa laporan keuangan yang andal akan terpenuhi jika informasi yang disajikan bebas

dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan fakta, serta dapat diverifikasi. Oleh karena itu pengendalian intern berperan penting dalam menciptakan informasi keuangan yang bersifat andal dan terhindar dari bentuk kecurangan. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Penelitian yang dilakukan Desy Sefri Yensi (2014) menunjukkan bahwa Sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan seluruh kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan keuangan daerah dipengaruhi oleh bagus tidaknya Sistem pengendalian intern yang berdampak pada laporan keuangan yang berkualitas pula. Sistem pengendalian intern yang baik dapat menghasilkan laporan keuangan daerah yang memenuhi karakteristi kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Assyifa Nurillah (2014) dan Wahyu Setiawan (2020) menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan uraian di atas, maka dirumuskan hipotesis untuk meneliti kembali hubungan antara sistem pengendalian intern dan kualitas laporan keuangan.

H2 : Sistem pengendalian internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.3 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan

Kompetensi Sumber Daya Manusia adalah kemampuan seseorang atau individu suatu organisasi (Kelembagaan) atau suatu Sistem untuk melaksanakan

fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien (Emilda:2014). Manusia merupakan elemen yang berperan penting dalam menghasilkan informasi yang berkualitas, manusia yang dapat melakukan analisis apakah informasi yang disajikan telah lengkap dan relevan atau tidak. Sumber daya manusia sebagai pengguna sistem diharuskan memiliki tingkat keahlian akuntansi yang memadai dan memiliki kemauan untuk terus belajar. Penelitian oleh Abdul Hafiz Tanjung (2011) menjelaskan bahwa kompetensi sumber daya manusia sangat berperan dalam menghasilkan informasi yang andal.

Hasil penelitian yang dilakukan Desy Sefri Yensi (2014) menunjukkan bahwa kompetensi SDM memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah. Jika kompetensi SDM memiliki latar belakang pendidikan di luar akuntansi, maka akan berdampak terhadap kualitas laporan keuangan, sehingga laporan keuangan yang dihasilkan menjadi tidak akurat karena tidak dikelola oleh SDM yang berlatar belakang pendidikan akuntansi. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Reno Julia Utama (2017) dan penelitian oleh Kadek Desiana Wati, Nyoman Trisna Herawati, Ni Kadek Sinarwati (2014) serta penelitian oleh Emilda Ihsanti (2014) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan uraian di atas, dirumuskan hipotesis ketiga untuk meneliti kembali hubungan antara kompetensi sumber daya manusia dan kualitas laporan keuangan :

H3 : Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.

2.4.4 Pengaruh Budaya Organisasi terhadap hubungan antara penerapan Sistem informasi akuntansi, Sistem Pengendalian Intern, Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Kualitas Laporan Keuangan.

Menurut Edy Sutrisno (2010) budaya organisasi merupakan perangkat Sistem nilai-nilai (*values*), keyakinan-keyakinan (*beliefs*), asumsi-asumsi (*assumption*), atau norma-norma yang telah lama berlaku, disepakati dan diikuti oleh para anggota organisasi sebagai pedoman perilaku dan pemecahan masalah-masalah organisasi. Budaya organisasi merupakan suatu kekuatan social yang tidak tampak, yang dapat menggerakkan orang-orang dalam suatu organisasi untuk melakukan aktivitas kerja.

Budaya organisasi menjadi pendukung organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi. Budaya yang kuat dan positif sangat berpengaruh terhadap perilaku dan efektivitas kinerja organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Putu Mery Oktaviani (2017) menunjukkan bahwa budaya etis organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Budaya organisasi dalam hal ini berfungsi mempermudah timbulnya komitmen pada suatu tujuan yang lebih luas daripada kepentingan diri individu seseorang. Lingkungan organisasi beserta nilai-nilai yang diterapkan dan diyakini oleh pegawai dapat mempengaruhi efektivitas jalannya sistem pengendalian internal, dan sistem informasi akuntansi termasuk mempengaruhi kinerja SDM dalam satu organisasi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa budaya organisasi yang baik dapat mewujudkan kualitas laporan keuangan yang baik pula. Dari uraian tersebut dirumuskan hipotesis sebagai berikut .

H4 : Budaya Organisasi memoderasi pengaruh positif penerapan sistem informasi akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan.

H5 : Budaya Organisasi memoderasi pengaruh positif sistem pengendalian internal terhadap kualitas laporan keuangan.

H6 : Budaya Organisasi memoderasi pengaruh positif kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas laporan keuangan.